

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sebagai implementasi dari amanah UUD, pemerintah menerbitkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 34, disebutkan tentang ketentuan program wajib belajar, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk yang sederajat.<sup>1</sup>

Terkait dengan standar yang bersifat nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan yang meliputi kurikulum, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Dilanjutkan pada ayat (2) menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan adanya pemetaan sekolah menjadi sekolah kategori standar dan sekolah kategori mandiri, maka setiap sekolah masih tergolong kategori standar diharuskan untuk memenuhi

---

<sup>1</sup> Pemerintah RI. “23 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional” Pasal 34. Ayat 2 dan ayat 3.

kedelapan aspek standar yang telah ditentukan dalam SNP tersebut untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). Untuk memudahkan bagi sekolah maupun masyarakat pada umumnya dalam memahami bagaimana wujud sekolah yang telah memenuhi SNP diperlukan contoh nyata, berupa keberadaan Sekolah Standar Nasional.<sup>2</sup>

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas). Menurut UNESCO sebagaimana dikutip oleh Anggun Goen, pendidikan itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada. Konsep sistem pendidikan mungkin saja berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan nilai-nilai kebudayaan (*transfer of culture value*). Konsep pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan masa lalu, sekarang dan masa datang.<sup>3</sup>

Beberapa definisi pendidikan di atas, pada dasarnya pengertian pendidikan yang dikemukakan memiliki kesamaan yaitu usaha sadar, terencana, sistematis, berlangsung terus-menerus dan menuju kedewasaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*Nation Character Building*).

---

<sup>2</sup> Muhammad Faishal Haq, Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, *Jurnal Evaluasi* 1, no 1 (2017) 26

<sup>3</sup> Anggun Goen, *Standar Pengelolaan Pendidikan*, no 5. (2017) 4 (<http://goenable.wordpress.com/>), diakses 20 Juli 2020

Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari krisis dan menghadapi dunia global.<sup>4</sup>

Pendidikan merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan yang tidak mengorientasikan pembelajarannya pada pencapaian mutu, cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh konsumen atau masyarakat. Sebaliknya lembaga pendidikan yang menjadikan mutu sebagai orientasi dan standar kualitasnya akan terus dicari oleh masyarakat sebagai konsumen pendidikan.<sup>5</sup>

Mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya), kualitas.<sup>6</sup> Menurut pandangan Umaedi dalam konteks pendidikan pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai *input* seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber belajar lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai *input* tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam proses belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Sedangkan mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil test kemampuan akademis (hasil ulangan atau ujian), dapat pula prestasi bidang lainnya, seperti: olah raga, seni bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 2007) 3.

<sup>5</sup>Anggun Goen, *Standar Pengelolaan Pendidikan* no 5 (2017) 6(<http://goenable.wordpress.com/>, diakses 20 Juli 2020

<sup>6</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet; IV ( Jakarta: Balai Pustaka 2007), 89.

<sup>7</sup> Umaedi, *Menejemen Pendidikan Mutu Merbasis Sekolah* (Jakarta : Dirjen Diknasmen Depdiknas 1999), 7.

Sebagai prinsip normatif mutu adalah suatu nilai yang tidak dapat dikompromikan. Berkompromi dengan mutu berarti bersedia menerima mutu yang rendah atau kedengarannya sebagai sebuah *contradiction in terminis* “menerima mutu yang tidak bermutu”. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini penting, karena sekolah sebagai elemen pendidikan yang lebih sempit memerlukan masukan dari masyarakat dalam penyusunan program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Selain itu, masyarakat selalu tumbuh dan berkembang serta memiliki identitas atau karakteristik tersendiri sesuai dengan sosial budaya dan latar belakang ekonominya.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 disebutkan bahwa: Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Seiring dengan tujuan tersebut, pendidikan diharapkan mampu mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi. Dengan cepatnya arus informasi dan teknologi komunikasi maka pendidikan diharapkan akan menyiapkan peserta didik yang akan bisa menjawab semua tantangan. Untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu membutuhkan pengelolaan yang baik dengan melibatkan semua komponen yang ada di dalamnya, seperti pemimpin atau kepala madrasah, guru, pengelola yayasan, pegawai dan *stakeholder* pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal dan efisien.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pemerintah RI. 20 Tahun “2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”(Jakarta: Permata Press, 2014), 6.

<sup>9</sup> Mulyasa. *Manajemen Berbasis Konsep, Strategi dan Implementasinya* (Bandung : Rosda Karya, 2008), 20.

Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total yaitu; (i) perhatian harus ditekankan kepada proses dengan terus-menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas atau mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh melalui pemahaman visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah harus menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan arif bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional.<sup>10</sup>

Peranan lembaga pendidikan dalam mengantarkan peserta didik untuk meningkatkan mutu perilaku keagamaan, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan manajemen pengelolaan pendidikan Islam dengan baik, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkan yang transparan. Dengan demikian, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Begitu pentingnya sebuah pengelolaan dalam pendidikan guna mengatur lembaga pendidikan agar dapat sesuai dengan tujuan. Sebuah pengelolaan suatu badan juga sudah terjadi ada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan seorang manajer yang amanah dan memiliki pengetahuan tentang organisasi, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” (QS. Yusuf 55).<sup>11</sup>

Pengelolaan merupakan kebutuhan yang niscaya untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi pendidikan dalam hal dalam memenuhi sarana prasarana, kurikulum, metode yang efektif, inovatif, solutif, efisien dan lain-lain. Pendidikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal apabila lembaga pendidikan tidak dikelola dengan baik, ada beberapa cara pengelolaan lembaga pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam mengelola lembaga pendidikan.

<sup>10</sup> Umaedi, *Menejemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah*, 2.

<sup>11</sup> Al-Quran, Yusuf ayat 55, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1996), 404. (Semarang: CV Asy-Syifa, 1996), 242.

Pengelolaan secara umum menurut klasifikasi dari Harbinson dan Myer dalam buku “*Management in Industrial World*” sebagaimana dikutip oleh Yayat M. Herujito, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Manajemen* terdapat 3 (tiga) tipe *managerial elite* yaitu :

1. *Patrimonial Management*

Ada pada perusahaan yang dimiliki oleh anggota-anggota keluarga, di dalam kedudukan-kedudukan penting sebagian hierarki jabatan dalam organisasi di tangan anggota-anggota tersebut.

2. *Political Management*

Suatu bentuk berupa kedudukan penting dan pokok dalam organisasi dipegang oleh orang-orang yang mempunyai hubungan politik dan berdasarkan atas loyalitas kepada suatu partai tertentu. Pertimbangan politik lebih diutamakan dan tujuan-tujuan perusahaan pun diarahkan kepada tujuan-tujuan politik tertentu.

3. *Profesional Management*

Kedudukan yang strategis dan penting diserahkan kepada mereka yang memberikan bukti atas kecakapan. Jadi, bukan didasarkan kepada hubungan keluarga atau partai politik. Pemberian kedudukan di dalam profesional manajemen ialah atas dasar jasa dan hasil yang mereka berikan dalam berkembangnya suatu organisasi atau usaha.<sup>12</sup>

Pengelolaan pendidikan ada yang dikelola dengan sistem *patrimonial management*. Secara etimologi, *patrimonial* berasal dari kata *patrimony* yang artinya menurut garis keturunan ayah.<sup>13</sup> Sedangkan secara terminologi, *patrimonial* menurut Weber sebagaimana dikutip oleh Deny J. A adalah bentuk organisasi sosial yang belum mencapai karakter birokrasi modern yang *impersonal* dan rasional.<sup>14</sup> Selanjutnya masih menurut Weber sebagaimana dikutip oleh Wahyudi Djafar sistem birokrasi *patrimonial* adalah suatu sistem birokrasi di mana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hierarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familier hubungan pribadi dan hubungan ‘bapak-

---

<sup>12</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta : Grasindo, 2015), 32-33.

<sup>13</sup> John M. Echoles dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 421.

<sup>14</sup> Dany J. A, *Catatan Politik* ( Yogyakarta: LKiS, 2006 ), 4.

anak buah'.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Dorojatun Kuntjoro menyebutkan birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga *perkawulaan*, di mana patron gusti atau juragan, sedangkan klien adalah *kawulo*. Hubungan antara *gusti kawulo* bersifat ikatan pribadi, implisit dianggap mengikat seluruh hidup, seumur hidup dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan.<sup>16</sup>

Pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik karena pendidikan dapat meningkatkan segala potensi peserta didik menjadi sosok sumber daya manusia (*human resource*) yang berkualitas tinggi suatu bangsa. Tanpa pendidikan, seorang anak diyakini tidak akan menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat, yakni menjadi sosok manusia utuh. Kualitas manajemen pendidikan memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah pengelolaan madrasah secara profesional.

Konteks tersebut banyak peneliti jumpai terhadap masih lemahnya pengelolaan di lembaga pendidikan madrasah, terutama madrasah-madrasah swasta, mulai dari pengelolaan, pengelolaan kepemimpinan, pengelolaan pembelajaran dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa kelemahan dan ketertinggalan madrasah swasta adalah sebagai akibat terbatasnya dana, sarana-prasarana dan fasilitas penunjang pembinaan, ditambahnya dengan lemahnya pola dan pengelolaan sistem pembinaan dengan menggunakan pengelolaan sistem tradisional. Hal ini dapat kita maklumi, karena para pendahulu yang mendirikan madrasah swasta tidak mengira bahwa perkembangan dunia pendidikan semakin lama semakin pesat dan modern.<sup>17</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwasanya di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus merupakan madrasah yang dikelola dengan pengelolaan tradisional, pengelolaan tradisional cenderung diasosiasikan dalam keberadaan keluarga karena di dalam masyarakat tradisional keluarga memegang peran penting sebagai institusi makro di mana identitas atau status yang melekat bisa

---

<sup>15</sup> Wahyudi Djafar, "Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Damarjati Bebas Korupsi", *Jurnal Legisiasi Indonesia*, 8, no. 2 (2011): 326

<sup>16</sup> Dorojatun Kuntjoro Jakti, " Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa, atau Penguasa", *Jurnal Prisma*, no 10 (1980): 6.

<sup>17</sup> Observasi pada lembaga pendidikan peneliti di berbagai kesempatan

lebih kelihatan. Pengelola menganggap kekuatan tradisional umumnya bersumber pada keluarga dan jaringannya di mana kemudian membentuk karakter patrimonial, pada lembaga tersebut terlihat lebih dominannya anggota keluarga yang menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, bahkan pada struktur organisasi pun ditempati oleh anggota keluarga, walaupun ada orang lain seolah-olah hanya sebagai tenaga pelengkap.<sup>18</sup>

Anggapan masyarakat umum bahwa pengelolaan madrasah yang dilakukan secara patrimonial memiliki banyak kelemahan bisa jadi dibenarkan, karena mengingat bahwa karakteristik patrimonial cenderung mengabaikan profesionalisme pengelolaan. Sebagai contoh, proses rekrutmen dan seleksi dilakukan tanpa melalui proses yang sering digunakan oleh lembaga profesional dengan standar baku yang ada dalam keilmuan SDM. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga hasil rekrutmen yang kurang profesional tadi, kemudian tidak dievaluasi dan cenderung dibiarkan, karena mereka adalah bagian dari keluarga pengelola. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak diambil tindakan tegas dan tepat untuk mengatasinya, maka lama kelamaan akan menimbulkan kelemahan dalam sebuah pengelolaan pendidikan. Bukan hanya itu, para tenaga pendidik yang lain yang mengetahui hal tersebut akan cenderung kurang simpatik bahkan tidak suka dengan cara pengelolaan tersebut.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Pengelolaan Madrasah Swasta dengan Sistem Patrimonial (Studi Komparasi Antara MI NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus dan MI NU Manafi’ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus)”*.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang *Pengelolaan Madrasah Swasta dengan Sistem Patrimonial (Studi Komparasi Antara MI NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus dan MI NU Manafi’ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus)*. Dengan judul di atas, inti persoalannya adalah pada model pengelolaan, kelemahan dan kelebihan model pengelolaan sistem patrimonial, persamaan dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Hamzah Asnawi (Guru MI NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus pada tanggal 25 Januari 2020 dan Bapak Haryono (Guru MI NU Manafi’ul Ulum Getassrabi Gebog) tgl 27 Januari 2020.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Ulil Abshor (masyarakat umum) 25 Pebruari 2020.

perbedaan proses dan hasil model pengelolaan sistem patrimonial di kedua madrasah tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana model pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus?
2. Bagaimana kelemahan dan kelebihan pengelolaan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan proses dan hasil pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis model pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.
2. Untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan pengelolaan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan proses dan hasil pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Pembaca
 

Mendesripsikan tentang pengelolaan madrasah swasta dengan sistem patrimonial sehingga dapat

digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pendidikan dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan secara teori bagi peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan pada penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap pengelolaan madrasah agar dapat menjadi lebih baik.
- b. Bagi guru dan staf kependidikan, penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk mempersiapkan diri secara matang segala yang dibutuhkan dalam pengelolaan madrasah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan baik untuk mengamankan anaknya disekolahkan di lembaga pendidikan yang dikelola secara baik.
- d. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana cara mengelola lembaga pendidikan dengan baik.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan memberikan sistematika tesis untuk memudahkan pemahaman isi yang terdiri dari :

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian utama tesis, yang terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menguraikan: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini peneliti menguraikan:

- A. Pengertian pengelolaan madrasah meliputi :  
Komponen pengelolaan madrasah, tujuan pengelolaan madrasah, dan fungsi pengelolaan madrasah,
- B. Pengertian sistem patrimonial, pengertian pengelolaan madrasah dengan sistem patrimonial.
- C. Ciri-ciri pengelolaan madrasah dengan sistem patrimonial
- D. Penelitian terdahulu
- E. Kerangka teori

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan : jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subyek penelitian dan penentuan sampel, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan pembahasan hasil penelitian yang terdiri:

- A. Gambaran obyek penelitian
  1. MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - a. Kajian Historis berdirinya MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - b. Identitas lembaga MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - c. Visi,Misi dan tujuan MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - d. Struktur organisasi MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - e. Keadaan pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
    - f. Keadaan sarana prasarana MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus
  2. MI NU Manafi'ul Ulum 2 Gebog Kudus

- a. Histori berdirinya MI NU Manafi'ul Ulum 2 Gebog Kudus
- b. Identitas lembaga MI NU Manafi'ul Ulum Gebog Kudus
- c. Visi, Misi dan tujuan MI NU Manafi'ul Ulum 2 Gebog Kudus
- d. Struktur organisasi MI NU Manafi'ul Ulum 2 Gebog Kudus
- e. Keadaan pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus
- f. Keadaan sarana prasarana MI NU Manafi'ul Ulum 2 Gebog Kudus

B. Deskripsi penelitian

1. Model pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.
2. Kelemahan dan kelebihan pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.
3. Persamaan dan perbedaan proses dan hasil pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.

C. Pembahasan

1. Analisis model pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.
2. Analisis kelemahan dan kelebihan pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU

Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.

3. Analisis persamaan dan perbedaan proses dan hasil pengelolaan pendidikan dengan sistem patrimonial di MI NU Miftahul Ma'arif Kaliwungu Kudus dan di MI NU Manafi'ul Ulum 2 Getassrabi Gebog Kudus.

## **BAB V : KATA PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

